

**PENGARUH SALES GROWTH, KONEKSI POLITIK, DAN KEPEMILIKAN  
INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar  
di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)**

**Mei Citra Dewi<sup>1)</sup>, Zirman<sup>2)</sup>, Volta Diyanto<sup>2)</sup>**

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

Email: [meicitradewi.2016@gmail.com](mailto:meicitradewi.2016@gmail.com)

*The Effect Of Sales Growth, Political Connections, And Institutional Ownership  
On Tax Avoidance*

*(Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock  
Exchange Period 2016-2018)*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of sales growth, political connections, and institutional ownership on tax avoidance. The dependent variable is tax avoidance in this study were measured using Book Tax Difference (BTD). The population in this study was a manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2016-2018. The total samples in this study were 44 companies determined by the purposive sampling method. This study uses documentation data collection methods obtained from data tracking through electronic media such as annual report data and company financial statements that are sampled. Data processing techniques in this study use the method of multiple linear regression analysis with SPSS Version 21. The results of this study indicate that the sales growth have significant effect on tax avoidance, with p-value of sales growth ( $0.000 < 0.05$ ) and institutional ownership have significant effect on tax avoidance, with p-value of the institutional ownership ( $0.000 < 0.05$ ). While political connections has no effect on tax avoidance, with a p-value of political connections ( $0.000 < 0.05$ ).*

*Keywords: Sales Growth, Political Connections, Institutional Ownership, Tax Avoidance*

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negara yang terbesar. Melihat besarnya

penerimaan negara dari sektor pajak, setiap tahun pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan pemungutan pajak agar penerimaan pajak selalu mencapai target. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah

menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Dari sisi perusahaan, upaya mereka menjadi hambatan bagi pemerintah mengoptimalkan penerimaan sektor pajak. Hambatan ini dapat bersifat perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat dengan enggan dalam membayar pajak, yang disebabkan antara lain perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik, dan struktur ekonomi suatu negara.

Dalam kaitannya dengan perlawanan aktif, ada beberapa modus yang biasanya digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak, antara lain *tax avoidance* yaitu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang dan penggelapan pajak atau penyelundupan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau bersifat tidak legal serta penghematan pajak (*tax saving*) yaitu upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Walaupun tindakan *tax avoidance* dan *tax evasion* mempunyai makna konotasi sebagai kriminal, namun yang perlu ditekankan kembali, bahwa *tax avoidance* adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup

pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan *tax evasion* jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Kustiawan & Solikin, n.d.).

Salah satu fenomena *tax avoidance* terbaru di Indonesia dapat diperhatikan pada kasus yang melibatkan perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sub sektor rokok, yakni PT Bentoel Internasional Investama (tbk). Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan *tax avoidance* di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Dampak perbuatan ini membuat negara menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan (nasional.kontan.co.id).

Dari permasalahan di atas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang terjadi seperti tingkat pertumbuhan penjualan (*sales growth*), koneksi politik, dan kepemilikan institusional.

Faktor pertama adalah *sales growth*. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016), penjualan yang semakin meningkat dapat mengakibatkan perusahaan memperoleh profit yang lebih tinggi, yang mana akan menyebabkan pembayaran pajak juga turut

meningkat. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian Dewinta dan Setiawan (2016), Nugraha dan Mulyani (2019) menyimpulkan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Swingly dan Sukarta (2015), Mahanani *et al.* (2017), Permata *et al.* (2018), menyimpulkan bahwa *sales growth* tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Faktor yang kedua adalah koneksi politik. Koneksi politik dapat mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak. Dunia bisnis berkaitan erat dengan politik. Keberhasilan suatu bisnis akan dipengaruhi oleh politik dimana bisnis itu berada. Hubungan antara pengusaha- pengusaha di Indonesia terjadi dengan munculnya pengusaha klien, yaitu pengusaha-pengusaha swasta yang beroperasi dibawah dukungan dan proteksi berbagai jaringan kekuasaan pemerintah (Dharma dan Ardiana, 2016).

Hasil penelitian Butje dan Tjondro (2014), Pranoto dan Widagdo (2015) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan menurut Purwanti dan Sugiyarti (2017), Ayu *et al.* (2017) justru menunjukkan tidak adanya pengaruh antara koneksi politik terhadap penghindaran pajak di perusahaan.

Faktor yang ketiga adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan Institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap

mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya *tax avoidance*.

Hasil penelitian Yulita (2014), Reinaldo (2017), dan Wulandari (2018) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Winata (2014), Damayanti dan Susanto (2015), Diantari dan Ulupui (2016) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Purwanti dan Sugiyarti, 2017 dengan judul pengaruh intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*, dimana peneliti mengganti salah satu variabel penelitian yaitu kepemilikan institusional.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah *sales growth*, koneksi politik, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh *sales growth*, koneksi politik, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

### 1. Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perpustakaan Universitas Riau dalam memberikan pemikiran untuk bidang pendidikan dan pengajaran agar dapat menambah cakrawala pengetahuan di bidang perpajakan.

### 2. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh *sales growth*, koneksi politik, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

### 3. Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi manajemen perusahaan mengenai pentingnya penerimaan pajak bagi negara, sehingga dapat mencegah melakukan praktik penghindaran pajak.

### 4. Akademisi

Peneilitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh *sales growth*, koneksi politik, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Tax Avoidance*

Menurut Pohan C. A. (2013), *tax avoidance* adalah strategi yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak secara legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Teknik penghindarannya dengan memanfaatkan kelemahan dan celah-celah dalam undang-undang perpajakan. *Tax avoidance*

merupakan upaya mengurangi beban pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan baik yang berskala besar atau berskala kecil. *Tax avoidance* merupakan hal yang umum dilakukan oleh wajib pajak, karena selain menguntungkan baginya tindakan tersebut juga tidak melanggar hukum.

Salah satu contoh dari aktivitas ini adalah memperbesar pendanaan yang bersumber dari hutang. Hal ini dilakukan agar perusahaan mengakui bunga hutang yang tinggi. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), bunga hutang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, wajib pajak menggunakan cara ini untuk meminimalisasi pajak terutanganya namun tetap tidak melanggar peraturan perpajakan.

### *Sales Growth* (Pertumbuhan Penjualan)

Menurut Kesuma (2009) juga menyatakan bahwa *sales growth* adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan perusahaan yang juga meningkat. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam menandai kesempatan-kesempatan yang akan datang. Pertumbuhan penjualan tinggi maka mencerminkan pendapatan meningkat sehingga beban pajak meningkat.

### Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan suatu kondisi terjalannya hubungan antara pihak tertentu dengan pihak

yang memiliki kepentingan dalam politik sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Koneksi politik membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal dan risiko pemeriksaan pajak rendah (Purwanti dan Sugiyarti, 2017).

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak yang berbentuk institusi. Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2013) institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi dapat memiliki saham mayoritas karena institusi mempunyai sumber daya yang lebih besar jika dibandingkan pemegang saham lainnya. Kepemilikan institusional merupakan bagian dari struktur kepemilikan yang termasuk ke dalam mekanisme *good corporate governance* yang merupakan salah satu karakteristik yang diyakini dapat mengurangi konflik keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara *agent* dan *principal*.

### **Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance***

*Sales growth* menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan

perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya (Budiman dan Setiyono, 2012).

Semakin besar volume penjualan suatu perusahaan menunjukkan bahwa *sales growth* perusahaan tersebut semakin meningkat. Apabila *sales growth* meningkat, laba yang dihasilkan perusahaan diasumsikan mengalami peningkatan. Laba perusahaan yang mengalami kenaikan berarti pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan semakin besar sehingga perusahaan akan cenderung untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Pendapat di atas didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), dimana penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi *sales growth* maka aktivitas penghindaran pajak semakin tinggi pula. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahanani dan Titisari (2016) dan Budiman dan Setiyono (2012) juga menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### **H1 : *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance***

#### **Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance***

Perusahaan menjalin koneksi politik dengan maksud untuk memperoleh berbagai keuntungan. Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan yang memiliki koneksi

politik adalah pinjaman dapat diperoleh dengan lebih mudah. Pemeriksaan pajak yang rendah juga merupakan salah satu keuntungan perusahaan memiliki koneksi politik. Pemeriksa pajak percaya bahwa perusahaan yang dibawah pengawasan pemerintah pasti operasionalnya baik sehingga meminimalisir pemeriksaan pajak perusahaan tersebut. Perusahaan memanfaatkan kemudahan peminjaman guna mendapatkan hutang sebanyak mungkin untuk operasional perusahaan karena semakin banyak hutang maka akan semakin sedikit beban pajak yang di tanggung perusahaan.

Hasil hipotesis ini didukung oleh penelitian Butje dan Tjondro (2014) bahwa koneksi politik dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan.

## **H2 : Koneksi Politik Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance***

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance***

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya (Permanasari, 2010).

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif dan dapat memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam

mengambil keputusan yang oportunistik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putranti dan Yulita (2014), Reinaldo (2017) dan Wulandari (2018) yang berpendapat bahwa terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*. Pemilik institusional yang memberikan pengawasan internal yang baik maka akan membantu pihak manajemen melakukan tugasnya. Hal tersebut akan membuat manajemen tidak ingin melakukan penghindaran pajak. Selain itu pengawasan dari pemilik institusional akan menjaga tindakan manajemen dalam membuat suatu keputusan salah satunya melakukan tindakan penghindaran pajak.

## **H3 : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance***

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2018. Data diambil dari situs resmi BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar aktif di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 – 2018 dengan jumlah populasi sebanyak 141 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 44 perusahaan. Total data yang akan diolah selama 3 tahun

(periode penelitian 2016-2018) sebanyak 132 laporan keuangan perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan (kriteria) tertentu dari peneliti sehingga sampel hanya representatif untuk populasi yang diteliti (Arifin, 2018).

### Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa laporan keuangan perusahaan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh berupa laporan keuangan auditan dan *annual report* yang menyediakan informasi variabel penelitian ini dari publikasi oleh Bursa Efek Indonesia atau situs resmi perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)  
Salah satu cara mengukur tax avoidance adalah menggunakan book-tax difference (BTD). Berdasarkan pengukuran Kholbadalov (2012) *book-tax*

*difference* (BTD) atau perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal digunakan untuk mengukur corporate tax avoidance.

$$BTD = ((Financial\ Income - Taxable\ Income) / (Total\ Aset))$$

2. Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*)

*Sales growth* merupakan penambahan volume penjualan dari waktu ke waktu atau tahun ke tahun (Dewinta dan Putu, 2016). Pengukuran *sales growth* pada penelitian ini menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian Purwanti dan Sugiyanti (2017). Adapun persamaan untuk mengukur *sales growth* adalah sebagai berikut :

$$Sales\ Growth = \frac{Penjualan\ periode\ t - Penjualan\ periode\ t-1}{Penjualan\ periode\ t-1}$$

3. Koneksi Politik

Koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak rendah (Sugiyanti, 2017). Variabel ini diukur dengan skala *dummy* dengan pengukuran ada atau tidaknya kepemilikan saham oleh pemerintah sedikitnya 20% di dalam perusahaan, sehingga jika perusahaan diketahui memiliki hubungan politik maka akan diberi nilai 1, lalu jika perusahaan tidak memiliki hubungan politik maka diberi nilai 0.

4. Kepemilikan Institusional  
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau

lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya (Bernandhi, 2013).

Kepemilikan institusional diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{INST} = (\text{Jumlah Saham Institusional}) / (\text{Jumlah Saham Beredar})$$

### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang diteliti untuk kemudian dilakukan analisa berdasarkan metode statistik. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Teknik pengolahan data dilakukan dengan alat bantu menggunakan program IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 21. Adapun model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{TAXAVO} = \alpha + \beta_1 \text{GROW} + \beta_2 \text{POL} + \beta_3 \text{INST} + \varepsilon$$

Keterangan :

TAXAVO : *Tax Avoidance*

$\alpha$  : Konstanta

Grow : *Sales growth*

Pol : Koneksi politik

INST : Kepemilikan institusional

$\varepsilon$  : error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Statistik Deskriptif

Berdasarkan pengujian statistik, diketahui bahwa *tax avoidance* mempunyai nilai

minimum 0,00054 dan nilai maksimum 0,90990. Nilai mean 0,0728875 dengan standar deviasi 0,14321770. *Sales growth* (X1) mempunyai nilai minimum 0,00470 dan nilai maksimum 0,85887. Nilai mean 0,1755677 dengan standar deviasi 0,17580073. Koneksi politik (X2) mempunyai nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 1,00. Nilai mean 0,0606 dengan standar deviasi 0,23952. Kepemilikan institusional (X3) mempunyai nilai minimum 0,08315 dan nilai maksimum 2,16966. Nilai mean 0,7476211 dengan standar deviasi 0,25564568.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas

Pada penelitian yang dilakukan telah dilakukan uji normalitas pada data maka dapat dilihat dengan gambar bawah titik-titik yang muncul dapat dikatakan sebagai data. Pada grafik diketahui bahwa data tersebut tidak normal tetapi dapat dilakukan transformasi data guna untuk menstabilkan sebaran data tersebut salah satunya dengan menggunakan transformasi logaritma. Dengan dilakukannya transformasi data ini maka data yang dihasilkan akan lebih stabil dan normal.

### Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstan) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara independen. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2018).

**Tabel 1 Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>		
Model	Durbin-Watson	Keterangan
1	1.322	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber : Pengolahan data SPSS, 2020

Dari Tabel 1 maka diperoleh nilai Durbin-Watson (d) adalah sebesar 1,322. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah apabila angka yang ditunjukkan dari nilai Durbin-Watson (d) berada antara -2 sampai dengan +2, maka dapat dikatakan model regresi tidak terdapat autokorelasi. Dengan demikian, nilai Durbin-Watson (d) 1,322 berada pada antara -2 sampai dengan +2, sehingga dapat diambil keputusan bahwa penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

**Hasil Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikolonieritas atau tidak. Multikolonieritas adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan diantara variabel bebas (Ghozali, 2018:107).

Pada penelitian ini, uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Apabila nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonieritas pada persamaan regresi penelitian. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2 Hasil Uji Multikolonieritas**

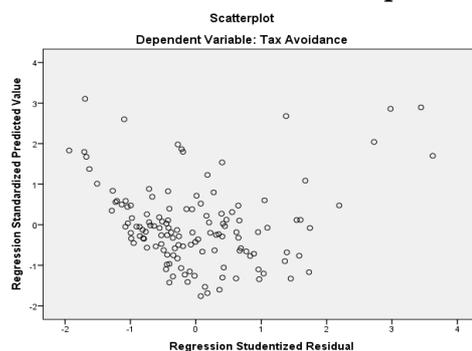
Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
X1	.993	1.007	Bebas Multikolonieritas
X2	.982	1.019	Bebas Multikolonieritas
X3	.980	1.021	Bebas Multikolonieritas

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS, 2020

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan hasil olah data dengan program SPSS maka diperoleh *scatterplot* yang tidak membentuk pola tertentu pada model regresi yang artinya model regresi tidak memiliki gejala heterokedastitas (Ghozali, 2018:149). Hasil uji heterokedastitas dapat dilihat melalui grafik *scatterplot* berikut ini :

**Gambar 1 Grafik Scatterplot**



**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Sesuai dengan permasalahan, tujuan, kerangka kosnep dan hipotesis dalam penelitian ini, selanjutnya dikembangkan model analisis berikut ini :

$$Y = a + \beta_1X + \beta_2X + \beta_3X + e$$

$$Y = -0.165 + 0.380 X + (-0.027) X + (-0.270) X + e$$

**Hasil Pengujian Hipotesis**

**Hasil Uji Hipotesis Sales Growth Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance**

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai t hitung 4.996 > t

tabel 1.9787. Hal ini menghasilkan keputusan menerima hipotesis 1 yang berarti bahwa bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dimana tingkat signifikan 0,000 dibawah nilai signifikan 0,05. Nilai koefisien regresi variabel *sales growth* sebesar 0.380 dengan artian bahwa setiap peningkatan aktivitas *sales growth* sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0.380. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa hubungan antara *sales growth* dan *tax avoidance* searah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama dinyatakan diterima yang berarti bahwa *sales growth* terbukti memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga semakin tinggi nilai *sales growth* maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), Purwanti dan Sugiyarti (2017), dan Nugraha dan Mulyani (2019) yang menyatakan bahwa *sales growth* memberikan pengaruh yang positif terhadap tindakan *tax avoidance*. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Swingly dan Sukartha (2015), Maharani, dkk (2017), dan Permata, dkk (2018) yang menyatakan *sales growth* tidak

memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **Hasil Uji Hipotesis Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance**

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai t hitung (-0.465) > t tabel (-1.9787). Hal ini menghasilkan keputusan menolak hipotesis 2 yang berarti bahwa bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dimana tingkat signifikan 0.643 diatas nilai signifikan 0,05. Nilai koefisien regresi variabel koneksi politik sebesar -0.027 dengan artian bahwa setiap peningkatan aktivitas koneksi politik sebesar 1 satuan, maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan nilai sebesar 0.027. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa arah hubungan antara koneksi politik dan *tax avoidance* berbanding terbalik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti, semakin tinggi koneksi politik suatu perusahaan maka tingkat penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah.

Hal ini juga sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2010 yang menggambarkan kepercayaan bahwa pada perusahaan yang mayoritas pemegang sahamnya adalah pemerintah tidak melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini menolak penelitian yang pernah dilakukan oleh Butje dan Tjondro (2014), Pranoto dan Widagdo (2015) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil yang diperoleh sesuai dengan penelitian yang dilakukan Fatharani

(2012), Purwanti dan Sugiyarti (2017), dan Ayu, dkk (2017) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh koneksi politik pada *tax avoidance*.

### **Hasil Uji Hipotesis Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai t hitung  $(-2.917) < t$  tabel  $(-1.9787)$ . Hal ini menghasilkan keputusan menerima hipotesis 3 yang berarti bahwa bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* dimana tingkat signifikan 0.004 dibawah nilai signifikan 0,05. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan institusional sebesar -0.270 dengan artian bahwa setiap peningkatan aktivitas kepemilikan institusional sebesar 1 satuan, maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan nilai sebesar 0.270. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa arah hubungan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance* berbanding terbalik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti, semakin tinggi kepemilikan institusional suatu perusahaan maka tingkat penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga dinyatakan diterima yang berarti bahwa kepemilikan institusional terbukti memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan saham oleh institusional perusahaan mempunyai potensi terhadap praktek penghindaran pajak. Sehingga

kepemilikan institusional yang tinggi akan menyebabkan *tax avoidance* rendah begitu pula sebaliknya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putranti dan Yulita (2014) dan sejalan dengan penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena para pemilik saham institusional cenderung menghindari resiko deteksi atas kegiatan penghindaran pajak dan tidak mau mengambil resiko yang dapat menghancurkan reputasi perusahaan. Menurutnya pula, pemilik saham institusional telah berfungsi sebagai control yang baik terhadap manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulita (2014), Reinaldo (2017), dan Wulandari (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winata (2014), Damayanti dan Susanto (2015) yang menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang menunjukkan persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut ini:

**Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.445 <sup>a</sup>	0.198	0.179	0.15792

**Sumber:** *Pengolahan data dengan SPSS, 2020*

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0.179 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh *sales growth*, koneksi politik dan kepemilikan institusional sebesar 17.9% sedangkan sisanya 82.1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan masih banyak variabel lainnya yang dapat mempengaruhi lebih besar dalam melakukan *tax avoidance*.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa variabel *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan signifikansi 0.000. Semakin tinggi *sales growth* perusahaan maka akan semakin tinggi perusahaan ingin melakukan perencanaan pajak maka akan melakukan *tax avoidance* oleh perusahaan agar menghemat pajak yang akan dibayarkannya.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diketahui bahwa variabel koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan signifikansi

0,643. Besar kecilnya koneksi perusahaan terhadap pihak politik tidak akan berpengaruh terhadap peluang perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) diketahui bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan signifikansi 0,004. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka probabilitas perusahaan melakukan *tax avoidance* akan berkurang. Semakin baik pengawasan yang dilakukan pemilik institusional maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.

### Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain atau menambahkan moderasi ataupun intervening.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan rentang waktu yang lebih lama agar dapat memberikan variasi data yang maksimal pada penelitian dan menambah jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan jenis perusahaan lain selain manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, G., Lestari, W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). *Pengaruh Corporate Governance, koneksi politik dan Leverage*

- terhadap Penghindaran Pajak, 18, 2028–2054.
- Bernandhi, Riza. 2013. “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan.” Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Butje, Stella dan Elisa Tjondro. 2014. “Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance”. *Journal Accounting Review*, Vol. 4. No. 2.
- Damayanti, Fitri., dan Tridahus Susanto. 2015. “Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 5. No. 2. Hal: 188-206
- Darmawan, I. G., & Sukartha, I. M. (2014). “Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak”. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 9. No. 1. Hal:143-161 .
- Dewinta, Ida Ayu Rosa, dan Putu Ery Setiawan. 2016. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 14, No. 3, Maret 2016. Hal: 1584-1613
- Fatharani, N. (2012). *Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan, dan Hubungan Politik terhadap Tindakan Pajak Agresif*. Skripsi Program Studi Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi Sembilan)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. (1976). “*Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*”. *Journal of Financial Economics*. Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. (2018). *Buku Panduan Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Riau.
- Kesuma, Ali. (2009). “*Analisis Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal serta Pengaruhnya Terhadap Harga Saham Perusahaan Real Estate yang Go Public di Bursa Efek Indonesia*”. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol 1 no 1.

- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2013). *“Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012”*. Jurnal Akuntansi Volume XVIII. No. 03, September 2014: 408-421.
- Nugraha, Moehammad Iman., dan Susi Dwi Mulyani. 2019. *“Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance”*. Jurnal Akuntansi Trisakti. Vol. 6. No. 2. Hal:301-324
- Pohan, Chairil Anwar. (2013). *Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis)*. Edisi Revi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2015). *Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance terhadap Tax Aggressiveness*, (2012), 472–486.
- Reinaldo, Rusli. (2017). *“Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, Dan CSR Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Terdaftar di Bei 2013 – 2015”* Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Vol. 4. No. 1. Hal : 45-59
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus (Edisi 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyarti, S. M. P. L. (2017). *Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak*, 5(3), 1625–1641.
- Swingly, Calvin., dan I Made Surakartha. 2015. *“Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance”*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 10, No. 1.Hal: 47-62
- Winata, Fenny. 2014. *“Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013”*. Tax & Accounting Review. Vol. 4. No. 1.
- Wulandari, Chantika Dyah Putri. 2018. *“Pengaruh Profitabilitas, Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi dan Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2015-2017)”*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.